

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djumadi. *Hukum Perburuahan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Djumialdji. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Ediwarman. *Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan: Sofmedia, 2011.
- Fahrojih, Ikhwan. *Hukum Perburuahan Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional*. Malang: Setara Press, 2016.
- Fajar, Mukti., et.al. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fofid, Willem Thobias. *Hukum Maritim untuk DP III (ANT III dan ATT III)*. Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran, 2019.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Isnaeni, Moch. *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*. Surabaya: Revka Putra Media, 2017.
- Irsan, Koesparmono. *Hukum Tenagakerja*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016.
- Khairani. *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Khakim, Abdul. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Perdana, Surya. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Medan: Umsu Press, 2023.
- Pujiastuti, Endah. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Semarang: University Press Semarang 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur, 1983.
- Santosa, Djohari. *Pokok-Pokok Hukum Perkapalan*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004.
- Santoso, Budi. *Hukum Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Bersama*. Malang: UB Press, 2012.
- Santoso, Sugeng. *Reformasi Hukum Ketenagakerjaan antara Perlindungan Hukum dan Fleksibilitas Dunia Usaha*. Jakarta: Kencana, 2025.
- Soedarjadi. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press: 2010.
- Soemitro, Ronny Hanitijio. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Sokin, Nur. *Pengantar Metodologi Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021.
- Subekti, et.al. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sumardjono, et.al. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2021.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatis, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Uwiyono, Aloysius, *et.al. Asas Asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

_____. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

2. Artikel Jurnal

Dewi, Murti Pramuwardhani. “Norma Perlindungan dan Kesempatan Kerja Bagi Lansia Potensial Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan”. *Kosmik Hukum* 23, no. 1 (Januari 2023): 100.

Hernawan, Ari. “Industrial Relations in the Perspective of Justice Theory by John Rawls”. *Mimbar Hukum* 26, no. 2, (Juni 2014): 276.

3. Tesis

Lusarno, Ghalib Alghani. “Kewenangan Pemerintah Terkait Perlindungan Hukum Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Laut”. *Tesis Magister Ilmu Hukum* Kampus Jakarta, Universitas Gadjah Mada, 2019.

Surijono, Ony. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Yang Bekerja Pada Perusahaan Perkapalan Nasional Di Tinjau Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan”. *Tesis Magister Ilmu Hukum*, Universitas Bosowa Makassar, 2023.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Covention (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5931).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang No. 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003).

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929).

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647).

Peraturan Menteri Perhubungan No. 51 tahun 2021 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Manajemen Kemanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 693).

Peraturan Menteri Perhubungan No. 58 Tahun 2021 tentang Sertifikasi *Maritime Labour Convention* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 698).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 778).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 339).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No SE-DJPL 20 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Perjanjian Kerja Laut Terhadap Gaji Pokok Awak Kapal Yang Bekerja Di Atas Kapal Berbendera Indonesia Yang Berlayar di Perairan Indonesia.

Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.287-Huk/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2024.

Keputusan Gubernur Banten Nomor 456 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2025.

Pengumuman No. PG-KSOP.Btn 20 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Perjanjian Kerja Laut Terhadap Gaji Pokok Awak Kapal Yang Bekerja di Atas Kapal Berbendera Indonesia Yang Berlayar di Perairan Indonesia.

Perjanjian Kerja Laut AA dan A di PT XYZ.